

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Wilayah perbatasan merupakan pertemuan dua wilayah dengan otoritas administratif yang berbeda. Wilayah perbatasan seringkali tidak menjadi perhatian utama dalam penataan ruang, sehingga peran serta perkembangannya cenderung hanya mengikuti perkembangan pusat yang meluas ke daerah pinggiran termasuk ke kawasan perbatasan. Padahal perkembangan di kawasan perbatasan dapat menimbulkan permasalahan yang terkait dengan batas wilayah administratif serta disparitas antar wilayah yang berbatasan langsung.

Dalam konteks pembangunan wilayah pada dasarnya kawasan perbatasan perlu mendapatkan perhatian khusus, karena pada wilayah ini akan muncul ketimpangan pembangunan sehingga berdampak pada munculnya permasalahan-permasalahan terkait dengan ekonomi, spasial, sosial budaya, lingkungan dan lain sebagainya. Ada kemungkinan bahwa masing-masing wilayah yang saling berbatasan memiliki karakter sosial budaya dan ekonomi yang relatif berbeda. Namun secara keseluruhan memperlihatkan adanya fenomena yang sama, yakni adanya interaksi langsung dan intensif antara masyarakat wilayah yang satu dengan wilayah lain, berupa hubungan-hubungan sosial kultural secara tradisional maupun kegiatan-kegiatan ekonomi.

Kabupaten Bangkalan merupakan kabupaten yang memiliki nilai strategis cukup besar dalam konstelasi wilayah lokal, regional hingga nasional dengan keberadaan Jembatan Suramadu yang membuat Kabupaten Bangkalan secara umum dapat dikatakan mengalami perubahan yang signifikan, hal ini disebabkan jelas akan merubah peranan dan struktur tata ruang kabupaten ini baik dalam konstelasi lokal maupun regional. Hal ini juga mempengaruhi berbagai program pembangunan dan kebijakan lokal maupun regional yang diambil karena harus menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan pembangunan wilayah ini, sehingga secara keseluruhan rencana tata ruang yang ada dan telah disusun sebelumnya memerlukan beberapa penyesuaian. (*RTRW Kabupaten Bangkalan Tahun 2008-2028*).

Kabupaten Sampang merupakan salah satu wilayah di Madura yang dalam skala regional menempati posisi yang strategis karena letaknya berada di jalur utama lintas selatan Selat Madura. Meskipun demikian hal tersebut belum bisa dimanfaatkan secara

optimal. Kabupaten Sampang yang diharapkan menjadi pusat perdagangan, rekreasi maupun hunian belum terwujud, bahkan dalam perkembangannya sejak tahun 90-an hingga kini dapat dikatakan stagnan. Kabupaten Sampang saat ini terdiri dari 14 wilayah kecamatan, 6 wilayah kelurahan dan 100 wilayah desa. Kondisi dimana sistem jaringan jalan utama di Kabupaten Sampang hanya bertumpu kepada salah satu jalur utama yaitu jalur jalan propinsi/nasional yang melalui pusat kota, menyebabkan perkembangan kota hanya berada di sekitar koridor ruas jalan utama tersebut. Selain itu keberadaan jalur lalu lintas antar kota di pusat kota menjadikan kondisi berlalu lintas di kota semakin tidak nyaman dan aman karena bercampurnya lalu lintas antar kota terutama kendaraan berat dengan lalu lintas lokal.

Beberapa permasalahan umum yang biasa timbul pada kawasan perbatasan antara lain (*Rencana Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Sampang Tahun 2009-2019*):

- ✓ Keragaman sumber daya, potensi dan permasalahan yang dimiliki masing-masing kabupaten/kota yang dikelola secara individu, sehingga rawan menimbulkan konflik sosial-ekonomi.
- ✓ Belum adanya koordinasi yang sinergis antara kabupaten/kota dalam pembangunan, sehingga potensi yang ada belum dapat dimanfaatkan secara optimal.
- ✓ Keterbatasan jarak memicu kesenjangan ekonomi wilayah antara pusat dan pinggiran sehingga menyebabkan daerah pinggiran relatif kurang beruntung dibandingkan dengan daerah pusat.
- ✓ Belum maksimalnya peran kota dalam menstimulan pertumbuhan wilayah, belum terbangunnya keterkaitan spasial dan mata rantai produksi dari kawasan perkotaan dan perdesaan, sampai pada menurunnya daya dukung kota besar sebagai pusat pertumbuhan wilayah sehingga tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi wilayahnya secara makro. Hal yang paling umum terjadi adalah kesenjangan antar wilayah. Kesenjangan wilayah sendiri diharapkan dapat dikurangi dengan berkembangnya wilayah-wilayah strategis, cepat tumbuh, sekaligus bersama-sama dengan wilayah tertinggal dan wilayah perbatasan.

Kecamatan Jrengik dan Kecamatan Sreseh merupakan dua kecamatan dari Kabupaten Sampang yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bangkalan yakni Kecamatan Blega dan Kecamatan Modung, sehingga dalam perkembangannya



membutuhkan perhatian yang khusus. Secara makro (kebutuhan pembangunan lintas wilayah) dan secara mikro (kebutuhan masyarakat lokal pada kawasan perbatasan) membutuhkan pembangunan yang sinergi dan tertata, sehingga dampak pembangunan dapat dirasakan secara nyata hingga ke daerah yang terpencil.

Alasan pemilihan di empat kecamatan yaitu terdapat kebijakan pembangunan di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang terkait dengan adanya jalan provinsi yang menghubungkan antara empat kecamatan tersebut. Adanya jalan provinsi tersebut maka sarana dan prasarana kawasan maupun perkotaan juga ikut mendukung. Akan tetapi sarana dan prasarana yang tersedia hanya terdapat di Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan, sehingga banyak masyarakat yang melakukan pergerakan ke kecamatan tersebut. Dapat dikatakan bahwa hierarki kawasannya cenderung mengarah ke kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan. Selain itu adanya interaksi yang terjadi di empat kecamatan yang langsung berbatasan karena akses penghubung hanya ada di empat kecamatan sehingga pertumbuhan hanya memusat di kawasan sekitar jalan utama yang menghubungkan dua wilayah perbatasan tersebut. Akan tetapi interaksi yang terjadi belum bisa menampilkan suatu pola keterpaduan spasial diantara keduanya.

Hal ini menuntut diperlukannya suatu perencanaan dan pengembangan wilayah yang tepat untuk mencapai kesejahteraan yang optimal dan berkelanjutan di wilayah perbatasan Kecamatan Jrengik dengan Kecamatan Blega dan Kecamatan Sreseh dengan Kecamatan Modung, dengan mengakomodasikan segala implikasi dari perkembangan Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan baik secara spasial, sosial-ekonomi maupun kewenangan administratif dalam mengakomodasi dan mengantisipasi segala implikasi perkembangan pusat untuk mencapai suatu pembangunan yang merata dan berkelanjutan baik secara spasial maupun secara ekonomi dan sosial.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, secara spesifik permasalahan yang terjadi pada kawasan perbatasan ini antara lain :

1. Kurang berkembangnya wilayah perbatasan karena lambannya perkembangan sarana dan prasarana transportasi khususnya jaringan jalan. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap perkembangan kawasan perbatasan secara keseluruhan, mengingat peran penting sarana dan prasarana transportasi sebagai penghubung simpul-simpul wilayah khususnya pusat-pusat pertumbuhan.

2. Terbatasnya fasilitas yang ada pada setiap kecamatan di kawasan perbatasan Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan, akibatnya pemenuhan kebutuhan masyarakat cenderung berorientasi ke Kota Sampang dan Kota Bangkalan terutama untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan (rumah sakit) dan perdagangan.

**Tabel 1.1 Fasilitas Eksisting Kawasan Perbatasan Tahun 2009**

No.	Kecamatan	Kabupaten	Jumlah Penduduk	Fasilitas			
				SMU	PT/Akademi	Puskemas	Pasar
1	Sreseh	Sampang	35.526	1	-	1	2
2	Jrengik		33.521	-	-	1	3
3	Modung	Bangkalan	48.462	-	1	2	4
4	Blega		62.474	1	-	1	3

Sumber: Kabupaten dalam Angka Tahun 2009

3. Belum tergalinya potensi sumber daya alam pada kawasan perbatasan dan belum adanya pola keterpaduan spasial yang jelas dalam hal kebijakan pembangunan. Hal ini dibuktikan masih terdapatnya kebijakan pembangunan yang berdiri sendiri terutama dalam pembangunan jaringan jalan, air bersih dan prasarana lainnya dan tidak terdapatnya kebijakan yang tujuannya untuk meningkatkan hasil sumber daya baik itu sektor pertanian maupun sektor yang lainnya sehingga hasilnya pun tidak berdaya saing dengan yang lainnya.

Dalam identifikasi permasalahan ini yang paling krusial adalah perencanaan spasial yang sering muncul adalah perencanaan yang masih dipisahkan oleh batas-batas administratif. Hal ini berarti tiap daerah atau wilayah masih cenderung melakukan pembangunan secara sendiri-sendiri atau masih kurangnya keterpaduan dalam pengembangan kawasan perbatasan.

### 1.3 Rumusan Masalah

1. Apakah penyebab terjadi ketimpangan wilayah di kawasan perbatasan Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan berdasarkan aspek ekonomi, sosial kemasyarakatan serta kondisi dan keberadaan berbagai infrastruktur yang ada di kedua wilayah studi?
2. Bagaimana arahan pengembangan kawasan perbatasan untuk mengurangi ketimpangan wilayah di Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan sehingga bisa selaras dan mampu menyesuaikan perkembangan kota guna menghindari ketimpangan wilayah khususnya pada kawasan perbatasan?



#### 1.4 Tujuan

1. Merumuskan penyebab terjadi ketimpangan wilayah di kawasan perbatasan Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan berdasarkan aspek ekonomi, sosial kemasyarakatan serta kondisi dan keberadaan berbagai infrastruktur yang ada di kedua wilayah studi, dimana pada studi ini akan dijabarkan pada hubungan interaksi dan pola pergerakan masyarakat dalam kesehariannya serta kondisi dan keberadaan berbagai infrastruktur yang ada di kedua wilayah studi.
2. Menyusun arahan pengembangan kawasan perbatasan untuk mengurangi ketimpangan wilayah di Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan sehingga bisa selaras dan mampu menyesuaikan perkembangan kota guna menghindari ketimpangan wilayah khususnya pada kawasan perbatasan.

#### 1.5 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini mempunyai beberapa manfaat, antara lain :

1. Bagi akademis, dapat meningkatkan bidang keilmuan terutama dalam bidang perencanaan wilayah dan kota dan bidang lainnya yang terkait. Selain itu, bagi para akademisi lain dapat menjadikan studi ini sebagai referensi dalam penelitian yang serupa.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadikan motivasi untuk ikut mendukung upaya pengembangan wilayah perbatasan Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan.
3. Bagi pemerintah, diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk menghasilkan pengembangan dan perencanaan wilayah perbatasan Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan lebih lanjut.

#### 1.6 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian dalam studi ini meliputi lingkup wilayah dan lingkup materi, dimana dalam lingkup wilayah akan dijabarkan batas administrasi dari lokasi penelitian. Sedangkan untuk lingkup materi akan dipaparkan mengenai batasan materi yang akan menjadi fokus pembahasan studi.

### 1.6.1 Ruang Lingkup Wilayah Studi

Ruang lingkup wilayah dalam penyusunan studi ini terdiri dari empat kecamatan yang saling berbatasan meliputi Kecamatan Jrengik yang berbatasan dengan Kecamatan Blega dan Kecamatan Sreseh yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Modung.

Batas administratif ke empat kecamatan yang langsung berbatasan yaitu :

- Sebelah selatan : Selat Madura
- Sebelah utara : Kecamatan Konang dan Kecamatan Tambelangan
- Sebelah timur : Kecamatan Torjun dan Kecamatan Pangarengan
- Sebelah barat : Kecamatan Galis dan Kecamatan Kwanyar

Luas untuk untuk masing-masing kecamatan yaitu :

- Kecamatan Modung memiliki luas 78,91 km<sup>2</sup> dengan jumlah sebanyak 17 desa
- Kecamatan Blega memiliki luas 92,82 km<sup>2</sup> dengan jumlah sebanyak 19 desa
- Kecamatan Jrengik memiliki luas 65,35 km<sup>2</sup> dengan jumlah sebanyak 14 desa
- Kecamatan Sreseh memiliki luas 71,95 km<sup>2</sup> dengan jumlah sebanyak 12 desa

### 1.6.2 Ruang Lingkup Materi

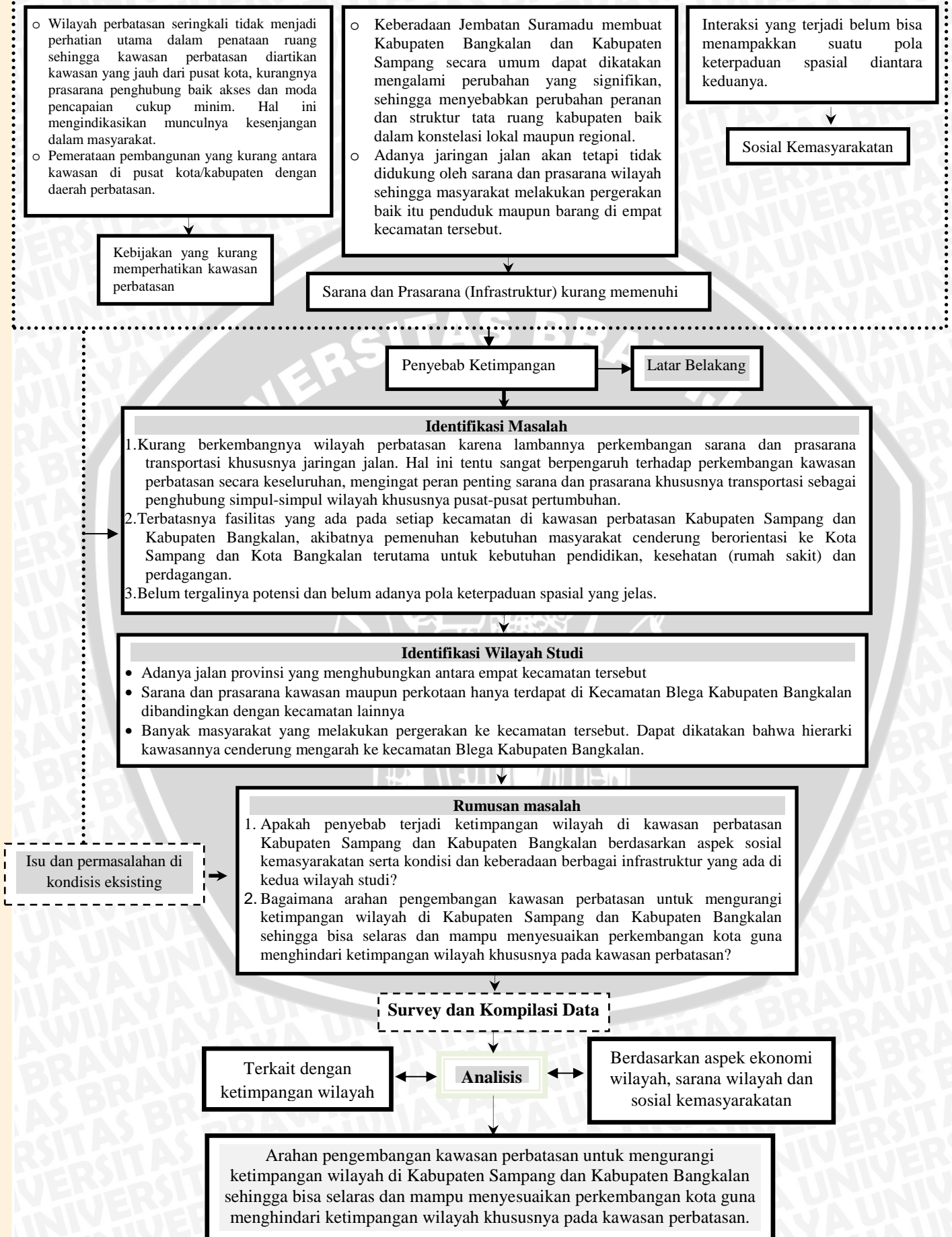
Adapun lingkup materi yang dibahas dalam studi yang berjudul “Arahan Pengembangan Kawasan Perbatasan Untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah Di Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan” antara lain :

- a) Identifikasi dan review aspek kebijaksanaan dan studi lain terkait dengan studi ini antara lain :
  - Review kebijaksanaan dari rencana tata ruang yang ada
  - Review studi lain yang terkait dengan kawasan perbatasan
- b) Identifikasi kondisi eksisting, potensi dan masalah pada kawasan perbatasan
  - Aspek fisik dasar meliputi : topografi, klimatologi, jenis tanah dan lain-lain.
  - Aspek penggunaan tanah meliputi : kawasan terbangun dan kawasan tidak terbangun (kawasan pertanian, kawasan permukiman dan lain-lain).
  - Aspek kependudukan meliputi : jumlah dan pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, mobilisasi penduduk, struktur penduduk menurut umur dan jenis kelamin, pendidikan dan mata pencaharian.
  - Aspek transportasi meliputi : sarana transportasi (jumlah dan jenis angkutan umum) dan prasarana transportasi (hierarki jalan, dimensi jalan dan jumlah angkutan umum).

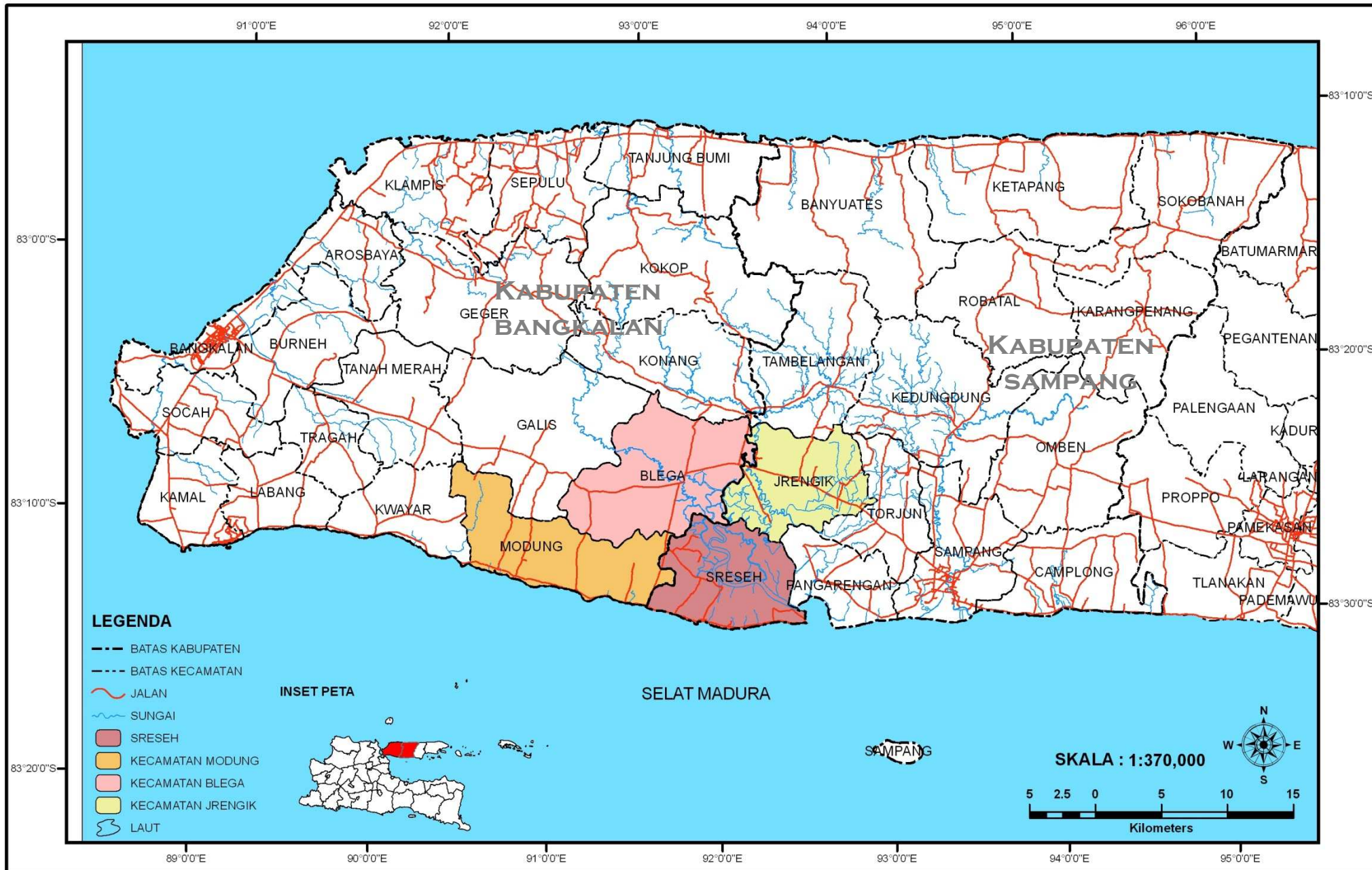


- Aspek jaringan fasilitas (perdagangan dan jasa, pemerintahan dan pelayanan umum, pendidikan, kesehatan dan peribadatan) dan utilitas (jaringan listrik, air bersih, telekomunikasi, drainase dan persampahan)
  - Kegiatan perekonomian wilayah meliputi : jenis komoditi dan jumlah produksi komoditi pada tiap sektor.
- c) Karakteristik sosial masyarakat di kawasan perbatasan. Karakteristik sosial yang dimaksud mencakup hubungan sosial antar masyarakat, kegiatan sosial dan adat istiadat.
- d) Pola pergerakan masyarakat di kawasan perbatasan. Pola pergerakan yang dimaksud mencakup faktor jarak jangkauan baik jangkauan masyarakat dalam mencari mata pencaharian dan penggunaan akan fasilitas yang ada.
- e) Ketersediaan infarastuktur di wilayah studi. Dalam bahasan ini akan dibatasi pada :
- Ketersediaan, keberadaan sarana dan parasarana yang ada di kawasan perbatasan dan proyeksi kebutuhan yang akan datang.
  - Manajemen pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan. Pada lingkup ini akan ditinjau apakah sudah terbentuk suatu perencanaan di wilayah perbatasan yang bersifat *patnrnership* yang bertujuan untuk pengembangan wilayah. Pada sub bahasan ini peneliti akan membatasi dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai kebijakan pembangunan di wilayah studi serta aspek regulasi kelembagaan dan organisasi penyelenggaraan pembangunan yang ada.

### 1.7 Kerangka Pemikiran

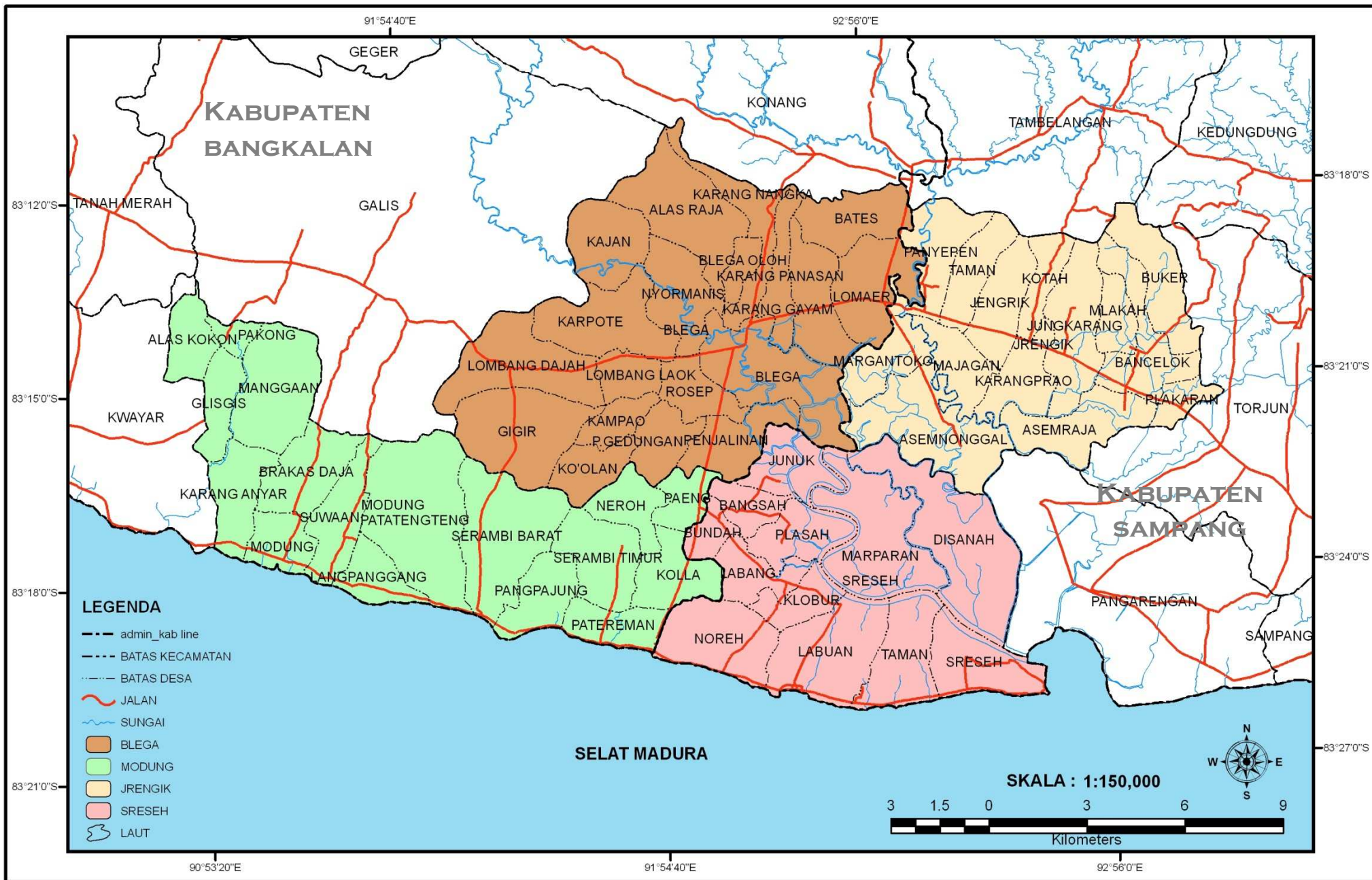






PETA 1.1 ORIENTASI WILAYAH STUDI





PETA 1.2 WILAYAH STUDI



